

**TELAAH MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KEBIJAKAN  
“KAMPUNG KONSERVASI” DI SEKITAR WILAYAH TAMAN NASIONAL  
GUNUNG HALIMUN SALAK**

**STUDY ON COMMUNITY EMPOWERMENT THROUGH CONSERVATION  
VILLAGE POLICY AROUND HALIMUN SALAK MOUNTAIN NATIONAL PARK**

**Oleh :**

**GinungPratidina, Irma Purnamasari**

Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi Universitas Djuanda Bogor. Jl. Tol  
Ciawi No.1, PO Box 35, Telp 0251-8240773, Kode Pos 16720 alamat Email  
ginung.pratidina@unida.ac.id

**ABSTRACT**

*Empirical data of land closure since 1989 to 2008 indicated that Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) area experienced degradation in its quality. This quality degradation of the area was caused by a destroy activities such as illegal logging, wild gold mining, or forest browsing. As a result, expansion of TNGH area became TNGHS impacted on much problem, especially in relation to low society welfare lived around the forest and in turn, affected on society dependency level upon the forest which impacted on high disturbance and damage of the forest coverage within national park. In order for facilitating a gap TNGHS in cooperation with JICA and many enterprises around TNGHS area established Conservation Village. Objectives of the research are (1) to measure optimal level of Conservation Village policy and its impact on society empowerment around the forest, (2) to collect up-to-date and important information about dominant factors affect Conservation Village policy especially in relation to many efforts in increasing society empowerment, and (3) to TNGHS Institution in Kabupaten Bogor, Sukabumi, and Lebak to create frame work of standard policy for Conservation Village.*

*The research approach used a descriptive analysis. Components those were revealed within Conservation Village policies were: (1) problem analysis, (2) policy review, (3) policy formulation, (4) action plan arrangement, and (5) monitoring and evaluation. Meanwhile, society empowerment is evaluated from (1) general, (2) couching, and (3) more supporting to the weak. Results of research analysis indicated that implementation of Conservation Village policies was not optimal yet, so that an approach strategy should be increased further such as with couching program.*

*Key words: optimal level of policy, conservation village, society empowerment, TNGHS area.*

**ABSTRAK**

*Data empiris penutupan lahan dari tahun 1989 hingga tahun 2008 menunjukkan bahwa kawasan TNGHS telah mengalami penurunan kualitas dan degradasi . Hal ini disebabkan oleh beberapa kegiatan yang tergolong kegiatan merusak hutan seperti kegiatan Illegal Logging, penambangan emas liar, ataupun perambahan hutan. Dengan demikian perluasan TNGH menjadi TNGHS menimbulkan beberapa permasalahan, terutama menyangkut masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat desa sekitar hutan sehingga dapat mempengaruhi tingkat ketergantungan masyarakat terhadap hutan yang berdampak pada tingginya gangguan dan kerusakan hutan yang berada di dalam kawasan taman nasional. Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, maka TNGHS bekerjasama dengan JICA dan beberapa perusahaan di sekitar kawasan TNGHS menerapkan kampung konservasi. Adapun tujuan yang direncanakan akan dicapai dari penelitian ini adalah (1) Mengukur optimalisasi kebijakan “kampung konservasi” dan pengaruhnya terhadap pemberdayaan*

masyarakat di sekitar hutan (2). Menghimpun informasi-informasi penting dan terbaru tentang faktor faktor dominan yang mempengaruhi kebijakan “kampung konservasi” terutama dikaitkan dengan upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat. (3) Membantu Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak di wilayah Kabupaten Bogor, Sukabumi dan Lebak untuk membuat kerangka kebijakan standar “kampung konservasi”.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Unsur-unsur yang diamati dari kebijakan “kampung konservasi” adalah (1) Analisis Masalah ; (2) Telaah Kebijakan ; (3) Formulasi Kebijakan.; (4) Penyusunan Rencana Aksi ; dan (5) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi. Sedangkan pemberdayaan masyarakat Dilihat dari : (1) Menyeluruh; (2) Pendampingan dan (3) Keberpihakan yang Lemah. Hasil analisis Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kampung konservasi masih belum optimal, sehingga strategi pendekatan kepada masyarakat dan keberlanjutan program perlu lebih ditingkatkan lagi antara lain dengan program pendampingan.

*Kata kunci : optimalisasi kebijakan; kampung konservasi; pemberdayaan masyarakat; masyarakat wilayah TNGHS*

## PENDAHULUAN

Salah satu bentuk penerapan konservasi sumber daya alam hayati adalah dengan pembentukan Taman Nasional yang dibuat untuk mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistem sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Dengan berpijak pada Undang Undang Pokok Kehutanan Nomor 5 Tahun 1967 dan Undang Undang Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam hayati Nomor 5 tahun 1990, melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 282/Kpts-II/1992 pemerintah menetapkan kawasan Ekosistem Gunung Halimun Salak sebagai kawasan konservasi dengan nama Taman Nasional Gunung Halimun (TNGHS) yang mempunyai luas kawasan 40.000 hektar, tersebar di tiga wilayah kabupaten, yaitu kabupaten Lebak Provinsi Banten, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Namun sangat disayangkan laju degradasi hutan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak dewasa ini cukup memprihatinkan. Data empiris penutupan lahan dari tahun 1989 hingga tahun 2008 menunjukkan bahwa kawasan TNGHS seluas 113.357 Ha telah mengalami penurunan kualitas dan degradasi seluas 22.000 Ha atau 19.4 %. Hal ini disebabkan oleh kegiatan Ilegal Logging, penambangan emas liar, dan perambahan hutan. Dengan demikian perluasan TNGH

menjadi TNGHS menimbulkan beberapa permasalahan, terutama menyangkut masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat desa sekitar hutan sehingga dapat mempengaruhi tingkat ketergantungan masyarakat terhadap hutan yang berdampak pada tingginya gangguan dan kerusakan hutan yang berada di dalam kawasan taman nasional.

Sejak Februari 2004 Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) sebagai pengelola kawasan TNGHS bersama *Japan international Cooperation Agency (JICA)* di bawah naungan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Dirjen PHKA) Departemen Kehutanan Republik Indonesia, melakukan kerjasama dalam hal pengelolaan kawasan TNGHS. Proses kerjasama tersebut diwujudkan dalam bentuk kerjasama teknis pengelolaan kawasan TNGHS dengan nama *Japan International Cooperation Agency Gunung Halimun Salak National Park Management Project* atau disingkat menjadi *JICA GHSNP-MP*. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan upaya pengelolaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati di TNGHS sesuai dengan prinsip kelestarian alam.

### Tujuan Khusus:

Adapun tujuan khusus yang direncanakan akan dicapai dari penelitian di tahun pertama adalah :

1. Menganalisis Model Kebijakan “Kampung Konservasi” Dan pengaruhnya dalam

Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS)

2. Memetakan positioning “kampung konservasi” Taman Nasional Gunung Halimun Salak berdasarkan analisis kekuatan dan kelemahan (analisis SWOT)
3. Membuat kerangka kebijakan “Kampung konservasi” Taman Nasional Gunung Halimun Salak

### **Urgensi (Kutamaan) Penelitian**

Banyaknya kerusakan yang diakibatkan oleh pelanggaran masyarakat menunjukkan masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat lokal, sebagai akibat dari kurangnya usaha dari para pelaksana kebijakan dalam mengembangkan kelembagaan lokal, menyebutkan bahwa pengrusakan terhadap hutan terjadi karena tingkat kesejahteraan masyarakat rendah. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut dipicu oleh ketidakmampuan masyarakat menguasai lahan garapan dan dengan adanya SK Menteri Kehutanan Nomor 174 tahun 2003 tentang perluasan Taman nasional, menyebabkan wilayah Perhutani masuk ke dalam wilayah Taman Nasional. Kesempatan masyarakat mengambil kayu bakar di hutan menjadi semakin sulit. Dalam artikel yang lain, Rahmawati (2008) menyebutkan bahwa hambatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adalah adanya faktor eksternal yang pada umumnya timbul karena kondisi ekonomi masyarakat lokal dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang peran dan fungsi TNGH.

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa perluasan TNGH menjadi TNGHS menimbulkan beberapa permasalahan, terutama menyangkut masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat desa sekitar hutan sehingga dapat mempengaruhi tingkat ketergantungan masyarakat terhadap hutan yang berdampak pada tingginya gangguan dan kerusakan hutan yang berada di dalam kawasan taman nasional.

Penelitian ini menjadi penting mengingat Ide pengembangan Model kampung Konservasi merupakan hal baru dalam upaya meningkatkan partisipasi dan

kesejahteraan masyarakat desa di sekitar kawasan konservasi. Pada intinya, Kampung Konservasi merupakan komunitas tertentu yang terdapat di dalam kawasan konservasi yang hidup dan berkembang bergantung pada pemanfaatan sumber daya alam hayati di dalam kawasan konservasi secara berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan tujuan mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di sekitar hutan.

Pentingnya penelitian ini dilakukan dapat diperhatikan dari berbagai hal yang akan dikembangkan sebagai berikut :

1. Mengukur optimalisasi kebijakan “kampung konservasi” dan pengaruhnya terhadap pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan
2. Menghimpun informasi-informasi penting dan terbaru tentang faktor faktor dominan yang mempengaruhi kebijakan “kampung konservasi” terutama dikaitkan dengan upaya meningkatkan kelestarian hutan.
3. Membantu Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak di wilayah Kabupaten Bogor, Sukabumi dan Lebak untuk membuat kerangka kebijakan standar “kampung konservasi”.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Program Kampung Konservasi**

Program kampung Konservasi meliputi empat kegiatan yaitu :

1. Restorasi/Rehabilitasi meliputi : a. Sosialisasi kegiatan b. Perencanaan Bersama Masyarakat c. Penanaman tanaman yang berfungsi secara konservasi, ekonomi dan sosial d. Pola tanam tidak secara monokultur e. Penerapan dan pengaturan pola tanam dari tanaman jangka pendek sampai jangka panjang f. Tumpang sari (tanaman rendah, sedang, tinggi) g. Pembuatan pembibitan h. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pembibitan h. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan pembibitan dan teknik tanaman.
2. Observasi Secara Partisipatoris meliputi : a. Mengamati bersama kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman potensi b. Observasi bersama dilakukan dan disaksikan oleh pihak pihak yang terkait

(Masyarakat, LSM, Balai TNGHS, Pemerintah Daerah) c. Observasi bersama bisa menjadi media untuk membangun kesadaran terhadap kawasan hutan d. Observasi dilakukan untuk melihat potensi yang ada dalam kawasan hutan yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi oleh masyarakat (terutama hasil hutan non kayu)

3. Peningkatan Pendapatan Masyarakat meliputi : a. Kelompok usaha bersama yang bergerak dalam pengelolaan hasil hutan non kayu b. Pengelolaan ekowisata yang dikelola bersama masyarakat c. Pengembangan tanaman industri atau bahan bahan kerajinan (bambu, rotan) d. Pengembangan teknologi tepat guna dan pengelolaan pasca panen. Membangun pemasaran bagi produk non kayu yang bisa dikembangkan. Ketersediaan informasi pasar bagi masyarakat. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui : pelatihan, studi banding, magang, pendidikan formal. Integrasi program melalui pendampingan berkelanjutan mulai dari peningkatan kapasitas.

### Kerangka Kebijakan Penyelenggaraan "Kampung Konsevasi".

Istilah kebijakan (policy term, menurut Charles ). Jones (dalam Budi Winarno, 2002 : 14), biasanya dipergunakan untuk menggantikan "kegiatan atau keputusan yang diambil" dan sering dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti "tujuan (goals), program (programs), keputusan (decisions), standar, proposal, dan grand design".

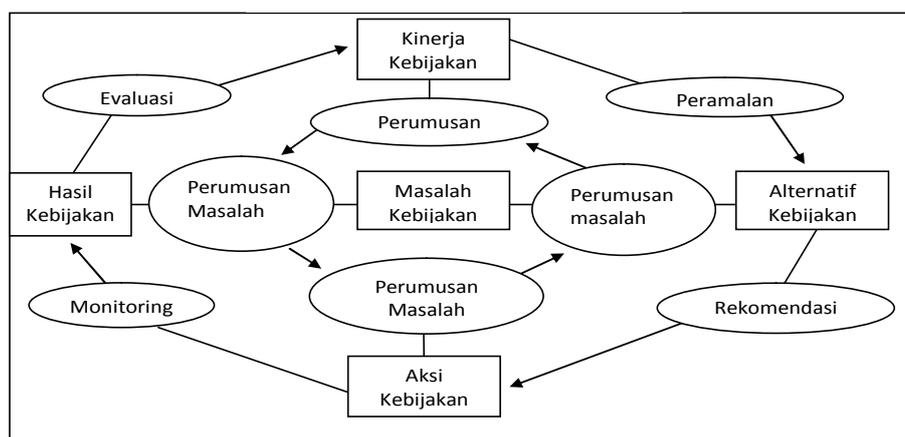
Akan tetapi menurut James Anderson (dalam Budi Winarno, 2002 : 14), istilah kebijakan secara umum dipergunakan untuk menunjuk "perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, atau suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu". Sedangkan Carl J. Friedrich (dalam Solichin Abdul Wahab 2001 : 3) memandang kebijakan sebagai "suatu tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. William N. Dunn (1998: 111-112; 1999 : 65-66) memandang kerangka kerja kebijakan (*policy framework*) sebagai proses pengkajian yang meliputi lima komponen informasi kebijakan (*policy-informational components*) yang ditransformasikan dari satu ke lainnya dengan menggunakan lima prosedur analisis kebijakan (*policy-analytic procedures*).

Lima komponen informasi kebijakan adalah : (1) Masalah kebijakan (*policy problem*), (2) Masa depan kebijakan (*policy alternative*), (3) Tindakan kebijakan (*policy action*), (4) Hasil kebijakan (*policy outcome*), dan (5) Kinerja kebijakan (*policy performance*).

Sedangkan lima prosedur analisis kebijakan mencakup : (1) Perumusan masalah (*problem structuring*), (2) Peramalan (*forecasting*), (3) Pemantauan (*monitoring*), (4) Penilaian (*evaluation*), dan (5) Rekomendasi (*recommendation*).

Kerangka kerja kebijakan sebagaimana dimaksud oleh William N. Dunn (1998 : 21) dapat dilihat pada Gambar 1.

**Gambar 1**  
**KERANGKA KEBIJAKAN**



Berdasarkan **Gambar 1** diatas, maka hubungan antara prosedur analisis kebijakan (gambar lingkaran) dan komponen informasi kebijakan (gambar persegi) adalah bahwa prosedur analisis kebijakan (perumusan masalah/problem structuring, peramalan / forecasting, pemantauan/monitoring, penilaian/ evaluation, dan rekomendasi / recommendation) berperan untuk menghasilkan komponen informasi kebijakan (masalah kebijakan/policy problem action, hasil kebijakan/policy outcome, dan kinerja kebijakan/policy performance). Dengan demikian, perumusan masalah (*problem structuring*) menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan. Peramalan (*forecasting*) menyediakan informasi mengenai konsekuensi dimasa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan. Rekomendasi (*recommendation*) ,menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan relatif dari konsekuensi di masa depan dari suatu perencanaan masalah. Pemantauan (*monitoring*) menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan. Penilaian (*evaluation*) menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan atau pengatasan masalah.

Kerangka kerja kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn tersebut di atas disebut juga. Langkah-langkah yang dilakukan dalam Analisis Kebijakan “Kampung Konservasi” adalah sebagai berikut :

### **Pemberdayaan Masyarakat**

Dengan melihat masalah sosial dan deforestasi yang begitu kompleks, maka visi pemberdayaan masyarakat di kawasan TNGHS adalah penguatan Pemahaman Konservasi dan Akses untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

Strategi pemberdayaan masyarakat di TNGHS perlu dikaitkan dengan upaya untuk menghentikan degradasi hutan alam serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kelembagaan masyarakat serta optimasi pemanfaatan berkelanjutan dan percepatan restorasi di lahan terdegradasi sesuai dengan tipologi masyarakat.

Untuk melaksanakan hal tersebut, maka menurut Bambang Supriyanto dan Willy Ekariyono pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa cara :

1. Harus dilakukan secara menyeluruh. Artinya pemberdayaan dapat melahirkan masyarakat yang madani, sejahtera serta berperan serta dalam pengelolaan TNGHS. Pemberdayaan masyarakat dapat meminimalkan konflik antar pihak dan manfaat kawasan dapat dioptimalkan.
2. Pemberdayaan bukan diartikan sebagai pemberian modal atau hadiah yang bersifat *charity* tetapi lebih kepada upaya pendampingan kepada masyarakat untuk menemukan jati dirinya yang mampu memahami karakter sumber daya alam dan kesejahteraan.
3. Pemberdayaan bukan diartikan kepada keberpihakan kepada yang kuat tetapi kepada kelompok masyarakat yang lemah. Penanaman modal yang berpihak dan bervisi pada lingkungan tidak diharamkan, tetapi perlu memberikan porsi yang adil terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan. Pendampingan kepada masyarakat dilakukan

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di dua desa yang ditunjuk dan dijadikan model Kampung Konservasi oleh Balai TNGHS dan JICA GHSNP-MP, yaitu :

1. Kampung Cimaggag desa Sirnaesmi Kecamatan Ciselok dan Desa Sukagalih di Resort Gunung Kendeng. Kedua desa tersebut berada dalam wilayah kabupaten Sukabumi.
2. Desa Lebak Gedong dan Ciladaeun Kecamatan Lebak Gedong di Kabupaten Lebak
3. Kampung Citalahab desa Malasari Kecamatan Nanggung di Kabupaten Bogor. Secara geografis desa desa tersebut berada dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Rendahnya tingkat sosial ekonomi penduduknya mengakibatkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya hutan

4. yang terdapat di dalam Taman Nasional. Pendukung lain desa desa tersebut ingin membandingkan dengan kelembagaan lokal yang memungkinkan pengelolaan hutan dengan nilai nilai tradisional yaitu masyarakat adat Kasepuhan Banten Kidul.

### Pendekatak Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik . Penentuan metode ini berkaitan dengan tujuan penelitian pada tahun pertama yaitu :

Menganalisis Model Kebijakan “Kampung Konservasi” Dan pengaruhnya dalam Meningkatkan Kelestarian Hutan di wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) (2) Membuat kerangka kebijakan “Kampung konservasi” Taman Nasional Gunung Halimun Salak

Analisis kebijakan model “Model Kampung konservasi” dan pengaruhnya dalam meningkatkan kelestarian hutan diukur berdasarkan indikator evaluasi kebijakan

### Pengumpulan Data

Data yang akan dikumpulkan dalam kegiatan ini adalah data primer dan data sekunder. Berkaitan dengan hal ini, secara umum ada 2 (dua) metode pengumpulan data yang akan dilakukan, yaitu :

1. Metode *Desk Study* yaitu pengumpulan data/informasi sekunder yang relevan dengan kegiatan penelitian.
2. Metode pendekatan Survey yaitu pengumpulan data/informasi primer dengan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pihak-pihak yang berkaitan penelitian ini. Survey dilakukan untuk mendapatkan data primer. Metode survey yang akan dilakukan adalah metode kualitatif melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan *Focus Group Discussion* (FGD).
3. Studi Pustaka/Literatur  
Studi pustaka/literatur merupakan kegiatan studi untuk mengkaji data-data sekunder yang berkaitan dengan upaya penyusunan laporan penelitian.

Teknik pemilihan responden adalah *purposive sampling*. Teknik *Purposive Sampling* ini dipilih dengan pertimbangan responden yang terpilih harus berasal dari kelompok target yang ada pada populasi.

Output yang diharapkan dari penelitian ini adalah Kerangka Kebijakan Model “Kampung Konservasi” Taman Nasional Gunung Halimun Salak.

#### a. IDENTIFIKASI VARIABEL PENELITIAN

Variabel	Dimensi	Indikator
Analisis Kebijakan	Analisis Masalah	a. Identifikasi data terpilih. b. Penetapan masalah kesenjangan kebijakan. c. Identifikasi faktor penyebab: sosial/lingkungan, agama, budaya, ekonomi, peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan lain-lain
	Telaah Kebijakan.	a. Analisis kebijakan : kebijakan yang diambil hendaknya berkaitan dengan data kesenjangan implementasi kebijakan Model Kampung Konservasi, klasifikasikan kebijakan tersebut dalam kategori : netral, bias dan responsif . b. Penetapan kebijakan strategi yang berkaitan dengan “Kebijakan Kampung Konservasi”.
	Formulasi Kebijakan.	a. Kebijakan baru responsif “Kampung Konservasi”. b. Tujuan kebijakan baru. c. Program/kegiatan pokok yang responsif “Kampung Konservasi”.

	Penyusunan Rencana Aksi.	Setelah program/kegiatan pokok ditetapkan, selanjutnya ditentukan rencana aksi dan kegiatan intervensi yang perlu dilakukan. Di dalam uraian kegiatan intervensi, tetapkan pula target/sasaran dan waktu pelaksanaan.
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	a. Penyusunan indikator kerja b. Pembentukan “Kampung Konservasi” Focal Point dan penggolongan kelompok kerja (Pokja) . c. Penyusunan mekanisme operasional.
Pemberdayaan Masyarakat	Menyeluruh	a. Keterlibatan Masyarakat b. Sesuai Dengan Kebutuhan
	Pendampingan	a. Waktu pendampingan b. Keberlanjutan program
	Keberpihakan yang Lemah	a. Pemilihan masyarakat sasaran b. Manfaat yang Diperoleh

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Lopkasi Penelitian

Secara geografis, kawasan TNGHS terletak di antara 106 021 – 1060 38 BT dan 60 37 – 6051 LS. Kawasan tersebut penting bagi keberlangsungan kehidupan baik ditinjau dari aspek biodiversitas maupun dari segi perlindungan lingkungan. Potensi jenis flora dan fauna mencapai ribuan species yang menjadi bukti bahwa kawasan ini merupakan tempat perlindungan sehingga merupakan surga bagi peneliti. Di samping itu, kawasan ini merupakan hulu sungai Cisadane, Cimandur, Cibareno yang mengalir ke DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten yang dapat memenuhi kebutuhan air bagi penduduk yang ada di daerah tersebut.

Prinsip saling percaya dan menghargai perspektif yang berbeda memberikan pilihan bagi masyarakat untuk bisa hidup bersama akan memberikan jaminan akan kelestarian hutan untuk memberi pemanfaatan yang berkelanjutan. Ide pengembangan Model kampung Konservasi dilatarbelakangi oleh keluarnya SK Menhut No 175 tahun 2003 tentang perluasan Taman Nasional Gunung Halimun. Dalam keputusan tersebut ditetapkan penunjukkan kawasan hutan produksi tetap, dan hutan produksi terbatas pada kelompok hutan gunung Halimun seluas kurang lebih 113.357 hektar yang terletak di provinsi Jawa Barat dan provinsi Jawa Barat dan provinsi Banten menjadi Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGH-S). Perluasan

tersebut didasarkan pada kesamaan faktor ekologis antara hutan pegunungan yang ada di kawasan gunung Halimun dan hutan pegunungan yang ada di kawasan gunung salak.

Sebagai dampak dari perluasan kawasan TNGH-S, masyarakat yang desa atau lahan garapannya berbatasan dan atau berada dalam wilayah pengelolaan TNGH-S menjadi pengelolaan TNGH-S menjadi resah. Dalam sistem pengelolaan dan pemanfaatan kawasan taman nasional tidak memungkinkan untuk memanfaatkan kawasan sebagai lahan garapan atau tempat hidup masyarakat. Kondisi ini membuat masyarakat khawatir akan status dan hak-hak mereka terhadap lahan yang menjadi sandaran hidup mereka selama ini.

Pola hidup yang berkembang pada masyarakat adat dan lokal yang berada di dalam dan sekitar Kawasan Halimun ditambah desakan populasi yang ada, sudah selajaknya melahirkan sebuah model yang bisa mencari titik temu antara kebutuhan masyarakat akan peningkatan kesejahteraan hidupnya di antara rambu-rambu konservasi dan tidak keluar dari koridor interpretasi hukum di atasnya. Model kampung konservasi melangkah membuat sebuah uji coba menghadapi tantangan tersebut bagi keberadaan taman Nasional. Dukungan dari masyarakat adat dan lokal yang tersebar di tiga kabupaten (Bogor, Sukabumi dan Lebak) mutlak diperlukan untuk sebuah penyelenggaraan kawasan konservasi.

Sebagai contoh dari hasil wawancara dengan masyarakat di sekitar TNGHS

menyatakan bahwa menurut mereka nilai konservasi dan keanekaragaman hayati perlu dijaga dan dipertahankan dalam menjaga hutan. Hal tersebut antara lain dilakukan dengan cara :

- a. Koordinasi antara petugas kehutanan dengan warga sekitar TNGHS
- b. Penanaman jenis tanaman yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat
- c. Melakukan penertiban kawasan
- d. Penegakkan aturan yang tegas

Model Kampung Konservasi di sekitar Kawasan TNGHS terbagi ke dalam tiga wilayah yaitu :

1. Wilayah Kabupaten Lebak yang terdiri dari Resort Gunung Bedil, Resort Cisoka dan Resort Cibedug
2. Wilayah Kabupaten Bogor yang dipusatkan di Resort Gunung Talaga terdiri dari Resort Gunung Kencana, Resort Gunung Butak, resort Gunung Botol dan Resort Gunung salak I, Resort Gunung Salak II
3. Wilayah Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari Resort Gunung Kendeng, Resort Cimanjaja, Resort Gunung Bodas, Resort Kawah Ratu.

### **Identitas Responden**

Sebelum memasuki tahap pembahasan tentang Optimalisasi model kebijakan “Kampung Konservasi” dalam Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Taman Nasional Gunung halimun Salak , maka terlebih dahulu akan disajikan mengenai identitas responden yang meliputi antara lain usia, pendidikan dan jenis usaha dari para responden terpilih.

#### **Identitas Responden Berdasarkan Usia**

Gambaran mengenai usia responden dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pemahaman mengenai program Kampung Konservasi yang diterapkan di daerah mereka, sehingga setiap masyarakat mampu mengembangkan program stimulan yang diberikan. Responden penelitian ini paling banyak yaitu 30 % berada pada usia 20-29 tahun

Berdasarkan identitas responden tersebut, maka dapat dikatakan bahwa

sebagian besar responden di Kabupaten Bogor, Lebak dan Sukabumi berada pada usia produktif. Mengingat usia responden berada pada usia produktif, maka merupakan faktor potensial yang perlu dikembangkan dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

### **Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh responden pada umumnya memiliki relevansi dengan wawasan berpikir dalam pelaksanaan pekerjaan yang merupakan tanggungjawabnya. Di samping itu pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam diri seseorang, karena semakin tinggi pendidikan seseorang akan menggambarkan tingkat kemampuan dan kecakapan seseorang dalam bertindak dan berperilaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya. Pada hakekatnya pendidikan adalah proses pendewasaan seseorang, sehingga latar belakang pendidikan yang dimiliki seseorang akan memberikan arti yang penting dalam pola perilakunya dalam hal ini berkaitan dengan upaya memberdayakan masyarakat. Pendidikan formal responden pada umumnya masih relatif rendah yaitu sekolah dasar baik lulus atau putus di tengah jalan.

### **Identitas Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan**

Jenis pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan sehari hari yang dimiliki responden terbanyak yaitu buruh tani/petani kebun

## **ANALISIS DATA**

### **Analisis Masalah**

Analisis masalah “*kebijakan Kampung Konservasi*” merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk merumuskan / menetapkan masalah *good governance* yang terjadi di tiap masyarakat sekitar Taman nasional Gunung Halimun Salak. Beberapa tahap dalam analisis masalah *good governance* adalah :

- a. Identifikasi data terpilih.
- b. Penetapan masalah kesenjangan kebijakan.

- c. Identifikasi faktor penyebab : Jawaban responden mengenai Analisis sosial/lingkungan, agama, budaya, masalah Kebijakan Kampung Konservasi ekonomi, peraturan perundang-undangan, dapat dilihat pada tabel berikut ini : kebijakan, dan lain-lain.

**Tabel 4.4.**  
**Rekapitulasi Responden Tentang Identifikasi Masalah Kebijakan Kampung Konservasi n=50**

No	Indikator	Penilaian Responden	Keterangan
1	Identifikasi Data Terpilah	2.87	Cukup baik
2	Masalah Kesenjangan Kebijakan	2.73	Cukup baik
3	Aspek Sosial	3.02	Cukup baik
4	Aspek Agama	3.43	Baik
5	Aspek Budaya	3.62	Baik
6	Aspek Kebijakan	2.92	Cukup baik
	Rata-rata	3.09	Cukup baik

Sumber : Hasil Penelitian, 2012

Dari data tersebut rata-rata responden mengatakan proses analisis masalah ketika penerapan program Kampung Konservasi cukup baik. Artinya program kampung konservasi masih perlu dioptimalkan lagi mengingat untuk memberikan sesuatu yang baru bagi masyarakat sangat membutuhkan waktu dan pendekatan tersendiri.

#### **Telaah Kebijakan.**

Kebijakan kampung konservasi dibuat dengan tujuan untuk lebih meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Sekalipun ada pelarangan untuk merambah hutan tetapi masyarakat diberikan alternatif pemecahannya misalnya dengan membuat kesepakatan kesepakatan. Pada intinya, kampung konservasi merupakan komunitas tertentu bergantung pada pemanfaatan sumber daya alam hayati di dalam konservasi secara berkelanjutan.

Dari jawaban responden mengenai aspek telaah kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.5.**  
**Rekapitulasi Jawaban Responden tentang Telaah Kebijakan(n=50)**

No	Indikator	Penilaian Responden	Keterangan
1	Kebijakan bersifat netral	3.14	Cukup baik
2	Kebijakan Bersifat Responsif	2,73	Cukup baik
3	Kebijakan Bersifat Bias	3.45	Baik
4	Strategi penerapan Kebijakan	2.82	Cukup baik
	Rata-rata	3.035	Cukup baik

Sumber : Hasil Penelitian, 2012

Berdasarkan data tersebut responden cenderung menganggap telaah kebijakan masuk dalam kategori cukup baik. Peneliti memperoleh keterangan bahwa pada umumnya kebijakan kampung konservasi menguntungkan kedua belah pihak. Namun responden mengungkapkan bahwasannya sebenarnya penduduk asli sangat menjaga kelestarian hutan karena sudah tinggal di

lingkungan tersebut cukup lama, tetapi banyak oknum-oknum pendatang yang justru melakukan pencurian kayu sehingga kebijakan mereka rasakan menjadi bias. Di satu sisi masyarakat mau patuh terhadap aturan, tetapi di sisi lain pendatang merusak ekosistem, dengan punishment yang tidak terlalu ketat. menurut polisi hutan yang diwawancarai, mereka mengeluhkan terbatasnya personil dan

sarana, alasannya sulit bagi mereka dapat mengawasi hutan yang begitu luasnya dengan jumlah personil yang terbatas dan kendaraan patroli yang terbatas.

### Formulasi Kebijakan

Kebijakan pemerintah tentang perluasan taman nasional berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 175/KPts-II/2003 tentang Penunjukkan Kawasan Taman nasional Gunung Halimun dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas Pada Kelompok Hutan Gunung Halimun dan Kelompok Hutan Salak seluas 113.357 Hektar di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten menjadi Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Pada umumnya masyarakat sekitar kawasan TNGHS sudah mengetahui kebijakan pemerintah menetapkan wilayah tersebut sebagai kawasan konservasi. Penetapan sebagai kawasan konservasi bagi masyarakat berarti mereka tidak boleh menebang pohon, berburu dan bercocok tanam di kawasan tersebut. Pada umumnya responden tidak

berkeberatan dengan adanya kebijakan kampung konservasi, namun untuk responden di Kabupaten Sukabumi yang kental dipengaruhi oleh adat kasepuhan mereka keberatan dengan kebijakan pemerintah tersebut, mengingat masyarakat adat kasepuhan sangat tergantung dengan kayu bakar, sebagai bahan bakar kehidupan sehari-hari, tetapi sekalipun mereka berkeberatan, mereka tetap menghormati kebijakan pemerintah tersebut. Sedikit demi sedikit terjadi pergeseran budaya, dimana dahulu memasak harus menggunakan kayu bakar, sekarang hanya dikhususkan ketika memasak nasi saja. Untuk di kabupaten Bogor dan Lebak, budaya kasepuhan tidak terlalu berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari mereka. Yang mereka tahu dengan kawasan konservasi. Menurut masyarakat kawasan Kabupaten Lebak, bercocok tanam di sawah atau ladang tidak dilarang oleh pemerintah, yang dilarang pemerintah adalah menambang emas, menebang pohon dan berburu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.6.**  
**Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Formulasi Kebijakan**  
**(n=50)**

No	Indikator	Penilaian Responden	Keterangan
1	Tujuan Kebijakan Baru	3.62	Baik
2	Program Kebijakan Baru	3.43	Baik
	Rata rata	3.525	Baik

Sumber : Hasil Penelitian, 2012

Dari data tersebut menyatakan bahwa pada umumnya masyarakat tidak berkeberatan dengan kebijakan baru, karena mereka juga sangat memahami pentingnya hutan bagi keberlanjutan hidup mereka.

### Penyusunan Rencana Aksi

Program kampung konservasi pada awalnya yaitu tahun 2005-2007 dilakukan oleh JICA. Sebagai Pilot project ditetapkanlah desa desa binaan yaitu Kampung Sukagalih, kampung Cimagpag, Desa Cisalimar dan Desa Sirnaresmi. Selanjutnya mulai tahun 2007 program Kampung Konservasi dilakukan oleh instansi terkait baik instansi swasta melalui

program CSR nya maupun Program pemerintah seperti Dinas Kehutanan Banten, Dinas Kehutanan Jawa Barat PLN, Antam, CIFOR dan TNGHS. Program yang dilakukan umumnya berdasar kan potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Untuk di Kabupaten Lebak program Kampung Konservasi dilakukan oleh Dishut Provinsi Banten, PLN, JEEF dan DIPA TNGHS. Program yang dilakukan antara lain pemanfaatan air bersih kerjasama antara Taman Nasional dengan PLN dan JEEF yaitu di kampung Lebak Picung, kampung Lebak Sangka dan kampung Cikuning. Di Bogor kampung konservasi juga melibatkan instansi instansi terkait seperti TNGHS, CIFOR,

Antam, Dishut Jabar. Di Sukabumi Kampung Konservasi dilakukan oleh TNGHS-JICA, Dishut Jabar dan TNGHS. Total kampung konservasi di area Taman Nasional Gunung Halimun Salak berjumlah 39 buah

Rencana aksi dan kegiatan intervensi yang dilakukan dapat dilihat dari target/sasaran dan waktu pelaksanaan.

**Tabel 4.7**  
**Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Rencana Aksi**  
**(n=50)**

No	Indikator	Penilaian Responden	Keterangan
1	Target	3.46	Baik
2	Sasaran	3.62	Baik
3	Waktu Pelaksanaan	3.23	Cukup baik
	Rata rata	3.43	Baik

Sumber : Hasil Penelitian 2012

Dari jawaban responden rata rata rencana aksi yang dilakukan oleh instansi terkait dapat dikatakan baik. Artinya masyarakat sedikit demi sedikit mau berubah. Salah satu program yang dilakukan adalah upaya

memerangi tengkulak yang banyak berada di wilayah tersebut, dengan cara mengelola tabungan masyarakat. Pendekatan yang dilakukan antara lain melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat.

#### **Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi**

Keberhasilan suatu program sangat tergantung pada proses Monitoring dan Evaluasi karena keberhasilan. Suatu program sangat

tergantung pada sustainablenya atau keberlanjutannya.

Tanggapan responden tentang Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program Kampung Konservasi sebagai berikut :

**Tabel 4.8**  
**Rekapitulasi Jawaban responden Tentang Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi**  
**n=50**

No	Indikator	Penilaian Responden	Keterangan
1	Penyusunan Indikator Kerja	2.76	Cukup baik
2	Pembentukan Pokja	3.52	Baik
	Rata rata	3.14	Cukup baik

Sumber : Hasil Penelitian 2012

Dari jawaban responden tersebut dapat dilihat bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi masih belum optimal. Kendala monitoring seringkali dirasakan terhadap program program yang dilaksanakan terkait personil ataupun dana pendampingan.

masyarakat secara keseluruhan , minimal di satu desa tersebut . penentuan Sasaran yang sebagian sebagian menyebabkan masyarakat merasa terkotak kotak sehingga sulit untuk mengharapkan partisipasi masyarakat. Masyarakat merasakan program kampung konservasi itu baik, karena program yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat menilai baik tentang pemberian program bersifat menyeluruh.

#### **Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat dapat dirasakan manfaatnya apabila ditunjukkan kepada

**Tabel 4.9**  
**Rekapitulasi Jawaban responden Tentang Bersifat Menyeluruh**  
**n=50**

No	Indikator	Penilaian Responden	Keterangan
1	Keterlibatan Masyarakat	3.45	Baik
2	Sesuai dengan Kebutuhan	3.52	Baik
	Rata rata	3.485	Baik

Sumber : Hasil Penelitian 2012

Berdasarkan jawaban responden terungkap pola adaptasi masyarakat terhadap suatu kebijakan di ketiga kawasan relatif berbeda. Di kawasan Kabupaten Bogor mata pencaharian penduduknya sebagai sebagian besar pemetik teh sehingga ada pendapatan yang tetap yang mereka terima perbulannya, sehingga masyarakat tidak terlalu bergantung pada kondisi hutan. Untuk kabupaten Lebak, mata pencarian utama adalah petani atau mengolah kebun, dan sebagian masyarakat juga memiliki pendapatan sampingan sebagai penambang emas. Sedangkan untuk responden di Kabupaten Sukabumi dimana nilai nilai adat masih melekat erat ketergantungan terhadap hutan masih tinggi, karena masyarakat masih mempercayai bahwa untuk memasak harus menggunakan kayu bakar. Budaya tersebut seringkali berbenturan dengan

kebijakan Taman nasional, sehingga adanya konflik antara masyarakat dengan petugas. Akibat yang ditimbulkan seringkali masyarakat bersifat apatis terhadap program Kampung Konservasi.

Selanjutnya keberhasilan suatu program pemberdayaan masyarakat juga sangat tergantung dari adanya pendampingan, mengingat masyarakat di sekitar taman nasional relatif masih rendah pendidikannya yang mempengaruhi pola pikir. Kendala yang dirasakan dalam pendampingan program adalah medannya yang berat dengan kondisi jalan yang curam, sehingga sulit untuk melakukan pendampingan yang intensif. Responden menilai upaya pendampingan berada dalam kategori cukup baik saja.

**Tabel 4.10**  
**Rekapitulasi Jawaban responden Tentang Upaya Pendampingan**  
**n=50**

No	Indikator	Penilaian Responden	Keterangan
1	Waktu pendampingan	2.78	Cukup baik
2	Keberlanjutan Program	3.56	Baik
	Rata rata	3.17	Cukup baik

Sumber : Hasil Penelitian 2012

Program pemberdayaan masyarakat selanjutnya tergantung pada adanya keberpihakan yang lemah, artinya masyarakat merasakan tidak dibedakan terhadap manfaat program. Namun program kampung konservasi ini berbeda dengan pilot project

yang sebelumnya, di mana kampung konservasi yang dicanangkan sekarang disesuaikan dengan kondisi lembaga lembaga yang melaksanakan. Pendekatannya pun berdasarkan pola yang sudah dianut oleh lembaga terkait.

**Tabel 4.11**  
**Rekapitulasi Jawaban responden Tentang Keberpihakan Yang Lemah (n=50)**

No	Indikator	Penilaian Responden	Keterangan
1	Masyarakat Sasaran	2.80	Cukup baik
2	Manfaat Yang diperoleh	3.52	Baik
	Rata rata	3.16	Cukup baik

Sumber : Hasil Penelitian 2012

Keberpihakan yang lemah masih dirasakan cukup oleh responden. Kenyataannya

punishment terhadap pelaku pencurian kayu masih dirasakan tidak adil oleh responden.

**Rekapitulasi Variabel Evaluasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat**  
**Tabel 4.12**  
**Rekapitulasi Jawaban responden Tentang Evaluasi Kebijakan Dan Pemberdayaan Masyarakat**  
**n=50**

<b>EVALUASI KEBIJAKAN</b>			
No	Indikator	Penilaian Responden	Keterangan
1	Analisis Masalah	3.09	Cukup baik
2	Telaah kebijakan	3,035	Cukup Baik
3	Formulasi Kebijakan	3.525	Baik
4	Rencana Aksi	3.43	Baik
5	Monitoring Evaluasi	3.14	Cukup Baik
	Rata rata	3,244	Cukup baik
<b>REKAPITULASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>			
No	Indikator	Penilaian Responden	Keterangan
1	Menyeluruh	3.485	Baik
2	Pendampingan	3.17	Cukup Baik
3	Keberpihakan Yang Lemah	3.16	Cukup baik
	Rata-rata	3.27	Cukup Baik

Sumber : Hasil Penelitian 2012

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa evaluasi kebijakan kampung konservasi dan pemberdayaan masyarakat masuk dalam katagori cukup baik, artinya pembenahan terhadap implementasi program kampung

konservasi masih belum optimal. Masih perlu pembenahan di sana sini terutama menyadarkan masyarakat bahwa masyarakat harus berdaya. Keberdayaan itu sendiri sangat ditentukan oleh masyarakat itu sendiri.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian tersebut diperoleh hasil evaluasi kebijakan dengan indikatornya analisis masalah, telaah kebijakan, formulasi kebijakan, rencana aksi dan monitoring evaluasi rata rata 3.244 dalam kategori cukup.

Sedangkan pemberdayaan masyarakat dengan indikator Menyeluruh Keberpihakan yang lemah dan Pendampingan rata rata 3.27 masih dalam katagori cukup. Dari hasil

tersebut, dapat dilihat bahwa evaluasi kebijakan kampung konservasi dan pemberdayaan masyarakat masuk dalam katagori cukup baik, artinya pembenahan terhadap implementasi program kampung konservasi masih harus terus diupayakan. Masih perlu pembenahan di sana sini terutama menyadarkan masyarakat bahwa masyarakat harus berdaya. Keberdayaan itu sendiri sangat ditentukan oleh masyarakat itu sendiri.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Antara News, 2008. Kerusakan Hutan di Indonesia turun 60 %. 14 Agustus 2008
- Atmadja, Nengah B, 1993, Pengelolaan Hutan Wisata Kera Sangeh. Oleh Desa Adat Sangeh, dalam Ekonesia 1 : 1 : 1-22
- Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak 2005. Strategi dan Program Model kampung Konservasi TNGHS 2007. Rencana Pengelolaan TNGHS Periode 2007-2026 Bambang Supriyanto, Willy Ekariyono 2007 Strategi Rekonstruksi dan Sosial Konservasi di TNGHS
- Bawa K.S & Seidler R, 1998, Natural Forest Management and Conservation of Biodiversity in tropical Forest. *Conservations Biology* 12 : 46-55
- Brack D, 2005, Illegal Logging. Sustainable development Programme Briefing paper (SDP Bp) 5/02, Catham House, London, UK (www document). URL [http://www.illegallogging.info/papers/SDPBP\\_05\\_02\\_Revised.pdf](http://www.illegallogging.info/papers/SDPBP_05_02_Revised.pdf)
- Curry, Patrick, 2000. On ecological Ethics : A Critical Introduction. *The Campaign For Political Ecology*.
- Dove, Michael R, 1985 "Pendahuluan" dalam Michael R. Dove (Ed). *Peranan Kebudayaan tradisional Indonesia dalam Modernisasi*, Jakarta : yayasan Obor Indonesia, Hal XV-LXIII
- Gerriya, S swarsi 2009 Menggali Kearifan Lokal Untuk Ajeg Bali dalam <http://www.balipos.co.id> diakses pada tanggal 21/1/2009
- Israel, Arturo 1990, Pengembangan Kelembagaan : Pengalaman proyek-Proyek Bank dunia, Jakarta LP3ES
- Pratidina, Ginung dan Rita Rahmawati, 2010 Strategi Adaptasi Ekologis dan Penguatan Kemiskinan Pada Masyarakat Sekitar Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Universitas Djuanda Bogor, Laporan Penelitian Strategis Nasional (Tahun Pertama)
- Pratidina, Ginung dan Rita Rahmawati 2011 Strategi Adaptasi Ekologis dan Penguatan Kemiskinan Pada Masyarakat Sekitar Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Universitas Djuanda Bogor, Laporan Strategis Nasional (Tahun Kedua)
- Purnamasari, Irma dan Rita Rahmawati, 2003 Pengembangan Model Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (Studi Kasus pada Pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun), Universitas Djuanda Bogor, Laporan Penelitian Dosen Muda
- Rahmawati, Rita 2008 "Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (Studi Komparatif di Desa Dinas dan desa Adat) dalam Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian 2008, Bogor, Universitas Djuanda Bogor
- Riwayat Penulis :
1. Ginung Pratidina, Dra, MSi. Dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi Universitas Djuanda Bogor. S1 di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD lulus tahun 2001. S2 di Magister Ilmu Administrasi Publik UNPAD lulus tahun 2002.
  2. Irma Purnamasari, S.Sos, MSi Dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi Universitas Djuanda Bogor. S1 di Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Djuanda Bogor lulus tahun 1996. S2 di Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro Semarang lulus tahun 1998.